

FAKTOR-FAKTOR EFEKTIVITAS SISTEM E-AUDIT

(Studi Empirik pada e-audit Perjalanan Dinas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DEWI NINDYASTUTI

NIM. 12030110141014

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dewi Nindyastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141014
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR EFEKTIVITAS
SISTEM E-AUDIT (Studi Empirik Pada
E-Audit Perjalanan Dinas BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 30 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dewi Nindyastuti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110141014
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR EFEKTIVITAS
SISTEM E-AUDIT (Studi Empirik Pada
E-Audit Perjalanan Dinas BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juni 2014

Tim Penguji

1. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt (.....)
2. Dr. Raharja, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Dewi Nindyastuti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Faktor-Faktor Efektivitas Sistem *E-Audit* (Studi Empirik pada *e-audit* perjalanan dinas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Dewi Nindyastuti

NIM. 12030110141014

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor efektivitas sistem e-audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wixom dan Todd (2005) di Virginia dengan perbedaan lokasi, objek, populasi, variabel, dan metode analisis. Penelitian ini menambahkan variabel independen berupa kompetensi pemeriksa serta temuan audit. Penelitian ini diharapkan mampu menilai hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan efektivitas sistem e-audit serta arah hubungan tersebut apakah mengarah pada arah negatif atau arah positif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *non probability* melalui studi kasus dengan populasi responden yaitu pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan *e-audit* sebanyak 17 orang. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan SPSS 19 dengan jenis uji non parametrik berupa uji normalitas dengan *Shapiro Wilk*, serta pengujian hipotesis dengan uji korelasi *Pearson Product Moment*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel temuan audit, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, kualitas sistem, serta kualitas informasi dengan efektivitas sistem *e-audit*. Sedangkan kompetensi pemeriksa tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap efektivitas sistem *e-audit*. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa efektivitas sistem *e-audit* dapat tercapai jika dilakukan peningkatan akan kemudahan penggunaan sistem *e-audit* bagi pemeriksa di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Kompetensi pemeriksa, temuan audit, *Theory Acceptance Model*, *Adaptive Structuration Theory*, efektivitas sistem *e-audit*.

ABSTRACT

This study aims to examine the factors the effectiveness of e-audit system in the BPK RI Representative of Central Java province. This study is a modified version of the study Wixom and Todd (2005). This study adds independent variables such as competence examiners and audit findings. Factors associated with the effectiveness of e-audit system, such as the competence of the examiner, the audit findings, perceived ease, perceived usefulness, quality systems, and quality information. This study is expected to assess the relationship between these factors in the effectiveness of e-audit system as well as the direction of the relationship is what leads to the direction of the negative or positive direction.

This study was conducted with non-probability method through a case study with a population of respondents is representative examiner CPC Central Java province of Indonesia which has implemented the e-audit as many as 17 people. This study uses primary data in the form of a questionnaire given to the examiner. Tests were conducted in the study using SPSS 19 with the type of non -parametric tests such as the Shapiro Wilk normality test, and hypothesis testing with Pearson Product Moment correlation test.

The results showed that there is a positive and significant relationship between the variables of audit findings, perceived ease of use, perceived usefulness, system quality, information quality and effectiveness of e-audit system. While the competence of the examiner does not have a positive and significant impact on the effectiveness of e-audit system. The findings of this study provide a recommendation that the effectiveness of e-audit system can be achieved if carried out will increase in the ease of use of e-audit system for examiners in BPK RI Representative Central Java Province.

Keywords: Competence examiner, audit findings, Theory Acceptance Model, Adaptive Structuration Theory, the effectiveness of e-audit system.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."
(QS. Al-Ikhlâs : 1-4)

"Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan dengan kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata."

#Dahlan Iskan#

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberi jalan keluar dari setiap urusannya dan diberi pertolongan dari tempat yang tak terduga, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan diukupi segala kebutuhannya"

(QS Ath-Thalaq : 2-3)

*"Kunci keberhasilan dalam setiap mimpi : usaha, do'a, dan restu orang tua.
Bermimpilah, berjuanglah, dan Allah akan menunjukan yang terbaik."*

Dewi

Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Papa, Mama, dan Mba Desy yang tercinta
Teman, sahabat, dan orang yang terdekat
Kalian adalah semangat hidupku. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa yang tak pernah putus.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Program Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro dengan skripsi yang berjudul **“Faktor-faktor Efektivitas Sistem E-Audit (Studi Empirik pada E-Audit Perjalanan Dinas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”**. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam untuk :

1. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan, kritik, saran, serta contoh yang baik yang berguna untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Marsono, S.E., M. Adv., Acc., Akt selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah mengizinkan, membantu, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kedua orangtua tercinta, Bapak Ir. Yuliharto dan Ibu Yuli Hidayati yang telah menjadi panutan, penyemangat hidup, serta memberikan segala yang terbaik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Beliau adalah orangtua yang terbaik sepanjang masa.

5. Kakak ku tersayang Desyana Yulianti, S.E atas kasih sayang, motivasi, nasehat, serta bawelannya. Mba adalah kakak yang terbaik. Terima kasih juga untuk segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta cinta yang selalu melimpah.
6. Keluarga keduaku di kost My House 165 tempat berbagi canda tawa bersama, Nurmaryani Wahyuni (Ndul) yang selalu memberi semangat dan dukungan setiap saat, Opi yang sukanya galau, Unyu dan Ajeng si cewe-cewe ceriwis & rempong. *Thank you for being the part of my live, we are family till the end.*
7. Sahabat-sahabat setiaku icikiwir *girls* sejak awal kuliah, tempat berbagi canda tawa dan tangis bersama. Hani yang selalu *support* dan siap diajak kemana-mana, Indah yang selalu riang dan penuh semangat dikidaw, Ayu bunbeh yang paling kalem diantara semuanya, Elsa yang selalu setia dengan ceriwisnya. *We will always being best friends.*
8. Sahabat-sahabat KKN menthel family, Sindy si emak, Mas Toga si babeh, Dini si cumi, dan Mas Rochman si pakde. 35 hari kebersamaan knn, suka duka kita lewati bersama di Karang Sari kece, semoga kita tetap kompak walau nanti terpisah jarak.
9. Sahabat seperjuangan dosen pembimbing Mami Endang, Yosua, Dewi P., Tama, Aldo, Fahmi, Ica, Erdhina, semangat dan sukses untuk kita semua.
10. Sahabat-sahabatku Agin, Chintya, Rini, dan Ardian. Kalian tempat berbagi susah senang dan saling mendukung walau kita jarang bertemu.

11. Teman-teman Akuntansi 2010 Reguler II khususnya kelas B atas pengalaman, kerjasama, dukungan, dan bantuan selama masa-masa kuliah.
12. Pak Sigit, Mba Ina, Pak Sugeng, Mba Ida, Mba Dewi, Mas Aria, dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berbagi ilmu, pengalaman, serta canda dan tawa bersama.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik pembaca maupun penulis secara pribadi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 30 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	xv
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TELAAH PUSTAKA	12
2.1. Kajian Teori	12
2.1.1. <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	12
2.1.2. <i>Adaptive Structuration Theory (AST)</i>	14
2.1.3. Perjalanan Dinas	16
2.1.4. Audit	18
2.1.5. E-audit.....	23
2.1.6. Kompetensi Pemeriksa.....	29

2.1.7.	Kualitas Sistem Informasi	32
2.1.8.	Temuan Audit	36
2.1.9.	Persepsi Kemudahan Penggunaan (<i>Perceived Easy Of Use</i>)	39
2.2.	Penelitian Terdahulu	40
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	42
2.4.	Pengembangan Hipotesis.....	42
2.4.1.	Kompetensi Pemeriksa.....	43
2.4.2.	Temuan Audit	44
2.4.3.	Persepsi Kemudahan Pengguna (<i>Perceived Easy of Use</i>).....	44
2.4.4.	Persepsi Kegunaan (<i>Perceived Usefulness</i>)	45
2.4.5.	Kualitas Sistem	46
2.4.6.	Kualitas Informasi.....	46
BAB III		48
METODE PENELITIAN.....		48
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	48
3.1.1.	Variabel Penelitian.....	48
3.1.2.	Definisi Operasional	49
3.2.	Populasi.....	54
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	55
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5.	Metode Analisis	56
3.5.1.	Statistik Deskriptif	56
3.6	Uji Normalitas Data.....	57
3.6.1	Uji <i>Shapiro Wilk</i>	57
3.7.	Uji Reliabilitas dan Validitas.....	57
3.7.1.	Uji Reliabilitas.....	57
3.7.2.	Uji Validitas.....	58
3.8.	Uji Hipotesis.....	58
3.8.1.	Uji Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	58

BAB IV	60
HASIL PENELITIAN	60
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.2. Analisis Data	64
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	64
4.3. Uji Normalitas Data.....	67
4.3.1. Uji <i>Shapiro Wilk</i>	67
4.4. Uji dan Validitas.....	68
4.3.1. Uji Reliabilitas.....	68
4.3.2. Uji Validitas.....	69
4.5. Uji Hipotesis.....	70
4.5.1. Uji Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>	70
4.6. Interpretasi Hasil.....	73
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Keterbatasan.....	84
5.3. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyimpangan Perjalanan Dinas Tahun 2012	3
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	42
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	51
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.2 Uji Normalitas Data <i>Shapiro Wilk</i>	64
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas	69
Tabel 4.4 Uji Validitas	70
Tabel 4.5 Uji Korelasi <i>Pearson</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori TAM	14
Gambar 2.2 Konsep <i>e-audit</i>	27
Gambar 2.3 Kualitas Sistem Informasi ..	47
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Ijin Penelitian	85
Lampiran B Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BPK	87
Lampiran B Kuesioner Penelitian	89
Lampiran C Tabel Nilai Kritis <i>Pearson Product Moment</i>	100
Lampiran D <i>Output</i> SPSS 19	102

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang dilakukannya penelitian tentang faktor-faktor efektivitas sistem *e-audit*. Dalam bab ini, dijelaskan pula mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era globalisasi telah dimanfaatkan diberbagai aspek. Pemanfaatan teknologi tersebut secara khusus dilaksanakan dibidang ekonomi, baik dalam aspek penjualan, pembelian, pemasaran, produksi, transportasi dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi turut dikembangkan dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan. Pemeriksaan berdasarkan sistem ini dikembangkan agar tercapainya 3 prinsip manajemen dalam audit, yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi dalam audit laporan keuangan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Prinsip Tata Kelola Keuangan Negara berdasarkan pada Tertib, Taat Peraturan, Transparan, Akuntabel Ekonomi, Efisien, Efektif,

Memperhatikan Rasa Keadilan dan Kepatuhan. Selain itu, di dalam UU No. 15/2004 dan UU No. 15/2006 menyatakan bahwa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diperiksa oleh BPK.

Berbagai cara dilakukan dalam menegakkan prinsip tata kelola keuangan transparan dan akuntabilitas, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak di seluruh bidang, baik bidang teknologi dan sistem informasi, bidang *financing*, bidang manufaktur, maupun bidang audit atau pemeriksaan laporan keuangan contohnya BPK. Sejak tahun 2010, BPK telah menetapkan suatu pembaharuan dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa kinerja lembaga negara baik pusat maupun daerah, khususnya di bidang pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Pembaharuan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengaudit laporan keuangan audit pemerintah dengan suatu sistem baru yang diberi nama *electronic audit (e-audit)*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2013 menyatakan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kepentingan daerah. Peresmian kebijakan *e-audit* secara global diawali dengan membangun suatu sinergi atau kesepakatan antara BPK dengan seluruh lembaga pemerintah baik di kalangan pemerintah pusat maupun di kalangan pemerintah daerah. Sistem *e-audit* digunakan untuk memeriksa berbagai akun dan transaksi yang tertera dalam laporan keuangan tidak

terkecuali dengan transaksi perjalanan dinas yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistemik.

Sektor publik yang baik dan berkualitas dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang tepat dan optimal serta berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Suatu sistem informasi bernilai jika manfaatnya lebih efektif dibandingkan biaya perolehannya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis *cost effectiveness* atau *cost benefit* khususnya pada besarnya biaya perjalanan dinas. Pengukuran informasi mengenai besarnya realisasi anggaran perjalanan dinas dilakukan pemeriksaan secara penuh bukan sampling sebagaimana umumnya pelaksanaan audit terhadap akun lainnya. Penerapan sistem *e-audit* dapat meningkatkan pengawasan dalam penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dan menciptakan efektivitas biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Data Penyimpangan Perjalanan Dinas

Tahun	Jenis Kasus	Besar kerugian	Jumlah Kasus
2012	Perjalanan dinas fiktif	Rp 40, 13 miliar	86 kasus
	Perjalanan dinas ganda	Rp 36,87 miliar	173 kasus

Sumber : Seksi Informasi Hukum BPK, 2012

Besarnya jumlah kasus maupun nilai kerugian yang dialami negara tersebut menjadi alasan BPK dalam melakukan audit perjalanan dinas secara

penuh. Tata kelola sistem informasi dan teknologi dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, seperti mengatur manajemen proses yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi berjalan efektif. Fokus utama dari tata kelola teknologi informasi pemerintah adalah tanggung jawab dewan dan eksekutif manajemen untuk mengendalikan formulasi dan implementasi strategi sistem informasi, untuk memastikan keselarasan antara sistem informasi dan organisasi, dan mengelola risiko sistem informasi yang terkait dengan cara efisien, efektif, dan ekonomis.

Efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan penggunaan anggaran sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) dengan penerapan sistem *e-audit* BPK. Dalam menilai keefektivan kinerja dari sistem *e-audit* BPK dalam memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah, peneliti menggunakan enam variabel untuk menilainya, yaitu kompetensi pemeriksa, temuan audit, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, kualitas sistem, serta kualitas informasi.

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik (Mc. Ashan, 1981 dalam Majalah JAI Perwakilan BPKP Provinsi NTT, 2012). Kompetensi pemeriksa penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksa memeriksa laporan keuangan auditee

berbasis sistem. Hal ini telah jelas dikemukakan dalam prinsip etika seorang akuntan publik yang dibuat oleh IAI kompetensi baik dari sisi pengetahuan, dan pengalaman kerja menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa untuk menjalankan tugas secara professional dan andal. Kompetensi pemeriksa dalam penerapan sistem *e-audit* harus dipersiapkan secara matang, agar dapat mencapai efektivitas dalam menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang andal, berkualitas, dan obyektif.

Temuan audit merupakan hal yang dicari oleh pemeriksa dalam memeriksa laporan keuangan *auditee*, karena adanya temuan audit menandakan adanya kesalahan dalam pelaporan kinerja keuangan suatu entitas. Semakin banyak jumlah temuan dan semakin besar tingkat materialitasnya, maka menggambarkan bahwa suatu entitas memiliki kinerja keuangan yang buruk. semakin banyak kecurangan yang terungkap dari sistem *e-audit*, maka sistem tersebut dapat dikatakan semakin efektif dalam menemukan penyalahgunaan wewenang atas keuangan negara. Kewajaran penilaian hasil audit laporan keuangan suatu entitas dapat dinilai berdasarkan banyak dan material atau tidaknya temuan audit yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi dalam proses audit tidak terlepas dari persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan sistem serta kegunaan atau manfaat dari sistem itu sendiri. Dengan tertanamnya persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem, dapat membuat penggunaan sistem secara

meluas. Persepsi kemudahan diartikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah (Davis, 1989). Persepsi manfaat atau kegunaan diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya baik secara positif maupun negatif bahwa menggunakan teknologi melalui sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989).

Dalam pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan negara terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, maka perlu dilakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan negara tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus didukung dengan tingginya kualitas sistem dan kualitas informasi yang akan digunakan. DeLone dan McLean (2004) menyatakan bahwa informasi yang berkualitas adalah informasi yang sistem berikan kepada para penggunanya. DeLone dan McLean (1992) menyatakan bahwa sistem yang berkualitas didasarkan pada penjelasan teknis dari antarmuka sistem informasi dan kualitas sistem yang memberikan keluaran berupa informasi.

Proses audit sistem tersebut, membutuhkan sebuah standar pemeriksaan yang menjadi dasar audit sistem pengelolaan keuangan negara. Standar Audit Pemerintah yang berlaku umum, memberikan kerangka kerja untuk melakukan audit berkualitas tinggi dengan kompetensi, integritas, objektivitas, dan kemerdekaan. Standar ini untuk digunakan oleh pemeriksa dari lembaga pemerintah dan entitas yang menerima penghargaan pemerintah dan organisasi audit yang melakukan SAP audit. Sistem

informasi memiliki peran besar dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan secara internal dalam pengelolaan keuangan dalam tubuh birokrasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan tepat guna. Persoalan jarak dan waktu yang beresiko menimbulkan ketidakefisienan dalam mengawasi kinerja entitas pemerintah di 33 provinsi. BPK berinisiatif untuk menangani masalah tersebut melalui jalinan sinergi dengan lembaga-lembaga negara baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan lembaga informasi. BPK sebagai lembaga pengawas keuangan, berupaya mengemas empat aspek dalam reformasi birokrasi yang mencakup kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis atau aktivitas utamanya serta sarana dan prasarana melalui e-BPK dan *e-audit* dengan pusat data/database sebagai sumber utamanya (Warta BPK, 2011).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wixom dan Todd (2005) yang berjudul “*A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance*”, menghasilkan kesimpulan bahwa model integrasi antara *user satisfaction* dan *Technology Acceptance* dapat terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam sektor pemerintahan, sistem pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan baik dan optimal dengan disertai pengawasan atas pengelolaan tersebut.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan sistem *e-audit* dan e-BPK yang bertujuan untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja entitas pemerintah dalam tata kelola keuangan negara. Untuk itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan variabel yang berbeda dalam menilai efektivitas dari sistem *e-audit*. Penelitian tersebut berjudul ***“FAKTOR-FAKTOR PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM E-AUDIT (Studi Empirik Pada E-Audit Perjalanan Dinas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang besar karena terdiri dari 34 provinsi. Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan demi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance). Untuk menuju pemerintahan yang bersih, BPK sebagai lembaga independen yang bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara melakukan terobosan baru yaitu menerapkan sistem *e-audit*. *E-audit* diterapkan untuk mencegah serta mengungkap terjadinya penyelewengan anggaran negara secara sistemik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan antara kompetensi pemeriksa dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
2. Bagaimana hubungan antara temuan audit dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
3. Bagaimana hubungan antara *perceived easy to use* dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
4. Bagaimana hubungan antara *perceived usefulness* dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
5. Bagaimana hubungan antara kualitas sistem dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
6. Bagaimana pengaruh antara kualitas informasi terhadap efektivitas penerapan sistem *e-audit*.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan antara kompetensi pemeriksa dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
2. Untuk menganalisis hubungan antara banyak temuan audit dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.
3. Untuk menganalisis hubungan antara *perceived easy to use* dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.

4. Untuk menganalisis hubungan antara *perceived usefulness* dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*
5. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas sistem dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*
6. Untuk menganalisis hubungan antara kualitas informasi dengan efektivitas penerapan sistem *e-audit*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai efektivitas penerapan sistem *e-audit* terhadap penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari hasil kinerja entitas pemerintah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ataupun ilmu pengetahuan kepada instansi terkait, masyarakat, maupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran atau kerangka dasar dalam penyusunan penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

Kajian teori adalah dasar teori yang menjadi landasan pelaksanaan penelitian. Kajian tersebut berisi tentang penjelasan variabel-variabel yang terkait serta hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Adaptive Structuration Theory* (AST) sebagai dasar penelitian.

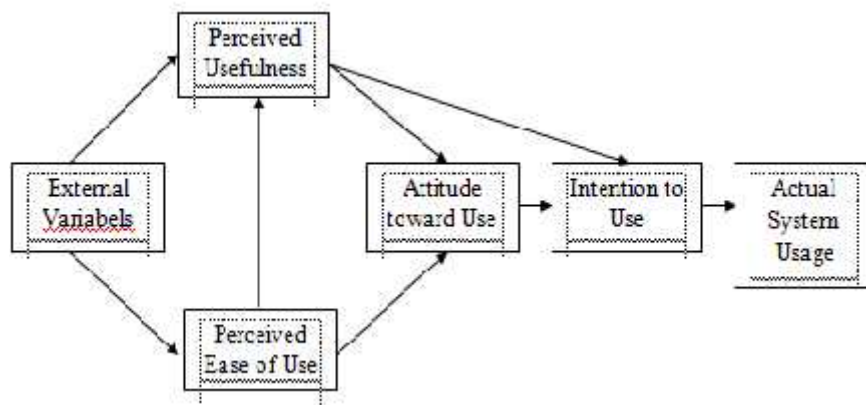
2.1.1. *Technology Acceptance Model* (TAM)

TAM diperkenalkan oleh Davis (1989), merupakan suatu teori adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang secara khusus diajukan pada model tingkat penerimaan pengguna teknologi. Alasan studi menggunakan TAM sebagai dasar teorinya adalah untuk menjelaskan indikator apa saja yang dapat menentukan tingkat penerimaan penggunaan teknologi, serta bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perilaku pengguna akhir (*end-user*) sebuah teknologi.

Tujuan lain dari konsep adalah untuk memberikan dasar dalam menganalisis pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna.

TAM menganggap bahwa 2 keyakinan individual, yaitu persepsi manfaat (*perceived usefulness*, disingkat PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy of use*, disingkat PEOU), adalah faktor utama yang mempengaruhi perilaku penerimaan komputer. Lebih lanjut Davis, *et al*, (1989) dalam Permana (2012) mengimplementasikan model konseptual TAM ke dalam praktik, yang menunjukkan hasil tingkat minat dan penerimaan seseorang terhadap sistem informasi atau teknologi.

Gambar 2.1 Teori TAM



Sumber : Davis *et al* (1989) dalam Permana (2013)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa TAM disusun oleh variabel utama yaitu persepsi penggunaan dan kemudahan penggunaan. Persepsi penggunaan (*perceived usefulness*) mengarahkan pada kepercayaan individu yang secara positif atau negatif meningkatkan kinerja melalui

penggunaan teknologi dan sistem informasi. Persepsi kemudahan (*perceived easy of use*) mengarahkan pada kemudahan dari para pengguna dalam mempelajari secara individu bagaimana proses mengoperasikan suatu teknologi atau sistem informasi.

TAM merupakan suatu teori mengenai sistem informasi yang menggambarkan sebuah model mengenai bagaimana pengguna bersedia untuk menerima dan menggunakan teknologi. Menurut Morris dan Dillon (1997) dalam Santoso (2012), TAM adalah suatu model untuk memperkirakan bukan mendeskripsikan, yang digunakan untuk memperkirakan penerimaan penerapan suatu sistem oleh para user. Dalam model ini menggambarkan bahwa pada saat pengguna ditawarkan untuk memanfaatkan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keputusan mereka mengenai bagaimana dan kapan mereka akan menggunakan teknologi melalui sistem tersebut.

2.1.2. *Adaptive Structuration Theory (AST)*

Adaptive structuration Theory (AST) merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Mashall Scott Poole seorang profesor komunikasi disalah satu universitas di Texas pada tahun 1994. AST dikembangkan dengan menyajikan suatu kerangka teoritis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana teknologi digunakan secara luas (Dowling, 2009).

AST menyatakan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang menggambarkan beragam bentuk interaksi, yaitu teknologi, lingkungan organisasi, tekanan sosial/normatif yang dirasakan, tugas dan cara sebuah struktur muncul dan mengubah seluruh proses penyesuaian (DeSanctis dan Poole, 1994 dalam Dowling, 2009). Berdasarkan hal diatas, penerapan sistem *e-audit* menjadi sebuah konsep dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

AST yang merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek menjadi landasan bahwa kompetensi pemerintah, kualitas sistem, dan kualitas informasi memiliki hubungan dalam proses penilaian seberapa efektif sistem *e-audit* yang telah diterapkan. Interaksi dari aspek kemajuan teknologi, menuntut adanya perbaikan dan pembaharuan atas kualitas sistem yang diterapkan maupun kualitas informasi yang akan dihasilkan berdasarkan sistem tersebut sebagai syarat mencapai tujuan efektivitas atas sistem *e-audit*. Pada aspek lingkungan organisasi menjelaskan bahwa BPK mempunyai suatu tuntutan kepada para pemeriksa bahwa setiap pemeriksa BPK harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemeriksa.

Kompetensi tersebut dapat dibentuk dan ditingkatkan melalui pendidikan formal di lembaga-lembaga pendidikan maupun

pendidikan non formal dengan ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal BPK maupun dari eksternal BPK. AST juga dapat dijadikan landasan bahwa temuan audit dapat dijadikan sebuah hasil interaksi antara teknologi, lingkungan organisasi, dan tekanan normatif yang berupa pelanggaran yang harus segera diperbaiki untuk mencapai tujuan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.1.3. Perjalanan Dinas

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 17 tahun 2013, perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dalam atau luar wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk kepentingan daerah. Perjalanan dinas yang dimaksud terbagi dalam dua jenis, yaitu :

a. Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.

b. Perjalanan Dinas Pindah

Perjalanan dinas yang dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh seorang pegawai harus dilaksanakan dengan mendasarkan pada empat prinsip utama, yaitu (PerGub Jateng No. 17 Tahun 2013) :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Efisien, yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat didasarkan pada kebutuhan nyata.
- c. Efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD.
- d. Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Dalam perjalanan dinas jabatan, terdapat berbagai komponen penilai besarnya biaya yang harus dikeluarkan, seperti uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, serta biaya menjemput/mengantar jenazah. Perjalanan dinas yang efektif, efisien dan akuntabel adalah perjalanan dinas yang nyata dilaksanakan dan didukung dengan berbagai dokumen asli sebagai bukti perjalanan dinas.

2.1.4. Audit

2.1.4.1. Definisi audit

Menurut Mulyadi, 2011 auditing merupakan suatu proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pengertian auditing dari sudut pandang profesi akuntan publik adalah suatu pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2011). Pemeriksaan sendiri memiliki suatu definisi, yaitu suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar (Kawedar, Rohman, Handayani, 2008).

(Cushing dan Loebbecke, 1986:32 dalam Dowling dan Leech, 2007), *Structured audit approach is :*

“a systematic approach to auditing characterized by a prescribed, logical sequence of procedures, decisions, and documentation steps, and by a comprehensive and integrated set of audit policies and tools designed to assist the pemeriksa in conducting the audit”

Audit penting dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat penggunaan anggaran pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan audit dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengawasan serta pengukur kinerja pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pemeriksaan atau auditing dapat dibedakan atas tiga bagian utama yaitu, finansial audit, internal audit dan manajemen audit. Finansial audit berhubungan dengan pemeriksaan kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan umumnya dilakukan oleh pemeriksa ekstern, pada pemerintahan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga tinggi negara.

Internal audit berhubungan dengan pengendalian manajemen dengan tujuan utama untuk melindungi harta perusahaan dan dilakukan oleh internal pemeriksa dalam perusahaan, sedangkan dalam pemerintahan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Sedangkan manajemen audit menekankan

pada pemeriksaan dalam pencapaian efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu unit usaha atau departemen dalam pemerintahan.

Audit keuangan memberikan penilaian independen tentang apakah suatu entitas yang melaporkan informasi keuangan (misalnya, kondisi keuangan, hasil, dan penggunaan sumber daya) yang disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang diakui. Audit keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAGAS (*Generally Accepted Government Auditing Standard*) termasuk audit laporan keuangan dan keuangan terkait lainnya (GAO, 2011). Jenis audit:

a) Audit laporan keuangan

Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan suatu entitas disajikan secara wajar dalam semua materi sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pelaporan audit laporan keuangan dilakukan sesuai dengan GAGAS juga termasuk laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan, kontrak, dan perjanjian hibah yang memiliki material berpengaruh pada laporan keuangan.

b) Jenis audit keuangan lain

Jenis lain dari audit keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAGAS memerlukan berbagai bidang pekerjaan, termasuk :

- i. Memperoleh cukup bukti yang tepat untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan tunggal, unsur-unsur tertentu, rekening, atau item dari laporan keuangan
- ii. Mengeluarkan surat untuk *underwriter* dan beberapa pihak meminta lain.
- iii. Audit kepatuhan dengan persyaratan kepatuhan yang berlaku yang berkaitan dengan satu atau lebih program pemerintah.

2.1.4.2. Audit Organisasi Pemerintah

Ruang lingkup audit penuh pemerintah termasuk keteraturan dan audit kinerja. Audit Keteraturan mencakup:

- a) Pernyataan akuntabilitas keuangan dari tanggung jawab entitas, yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi catatan keuangan dan ekspresi opini tentang laporan keuangan.
- b) Pernyataan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

- c) Audit sistem dan transaksi keuangan termasuk evaluasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- d) Audit pengendalian internal dan fungsi audit internal.
- e) Audit kejujuran dan kepatutan dari keputusan administratif yang diambil dalam entitas yang diaudit, dan
- f) Pelaporan hal-hal lain yang timbul dari atau berkaitan dengan audit yang SAI menganggap harus diungkapkan.

Audit kinerja yang bersangkutan dengan 3 prinsip utama audit manajemen yang dikenal dengan sebutan 3E, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas:

- a) Audit perekonomian kegiatan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek administratif, dan kebijakan manajemen.
- b) Audit efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya, termasuk pemeriksaan tentang sistem informasi, tolak ukur kinerja dan pengaturan pemantauan, dan prosedur diikuti oleh entitas yang diaudit untuk menanggulangi kelemahan yang teridentifikasi.
- c) Audit efektivitas kinerja dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan entitas yang diaudit, dan audit terhadap dampak nyata dari suatu aktivitas dibandingkan dengan dampak yang diinginkan.

2.1.5. *E-audit*

2.1.5.1. Definisi Sistem *e-audit*

Menurut *Florida Department of Revenue*, 2011 Audit elektronik, atau *e-audit*, adalah audit dengan bantuan komputer yang menggunakan catatan elektronik untuk menyelesaikan semua atau bagian dari audit. *E-audit* pemerintah dilaksanakan dengan mempersiapkan *software* yang disesuaikan untuk membentuk suatu *database* yang menyimpan berbagai informasi kinerja keuangan entitas pemerintah.

Audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan semestinya. Tujuh langkah proses audit (Diana dan Michel, 2011):

- a) Implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta *control practice* yang dapat disepakati semua pihak.
- b) Tetapkan langkah-langkah audit yang rinci.
- c) Gunakan fakta/bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat.
- d) Buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan.
- e) Telaah apakah tujuan audit tercapai.
- f) Sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan.

- g) Pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta *control practice*.

Sebelum menjalankan proses audit, tentu saja proses audit harus direncanakan terlebih dahulu. *Audit planning* (perencanaan audit) harus secara jelas menerangkan tujuan audit, kewenangan pemeriksa, adanya persetujuan manajemen tinggi, dan metode audit. Metodologi audit:

- i. *Audit subject*. Menentukan apa yang akan diaudit.
- ii. *Audit objective*. Menentukan tujuan dari audit.
- iii. *Audit Scope*. Menentukan sistem, fungsi, dan bagian dari organisasi yang secara spesifik/khusus akan diaudit.
- iv. *Preaudit Planning*. Mengidentifikasi sumber daya dan SDM yang dibutuhkan, menentukan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk menunjang audit, menentukan lokasi audit.
- v. *Audit procedures and steps for data gathering*. Menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji kendali, menentukan siapa yang akan diwawancara.
- vi. Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan. Spesifik pada tiap organisasi.
- vii. Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen. Spesifik pada tiap organisasi.

- viii. *Audit Report Preparation*. Menentukan bagaimana cara memeriksa hasil audit, yaitu evaluasi kesahihan dari dokumen-dokumen, prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang diaudit.

2.1.5.2. Konsep Sistem *e-audit*

Definisi *e-audit* menurut Florida, *Department of Revenue*:

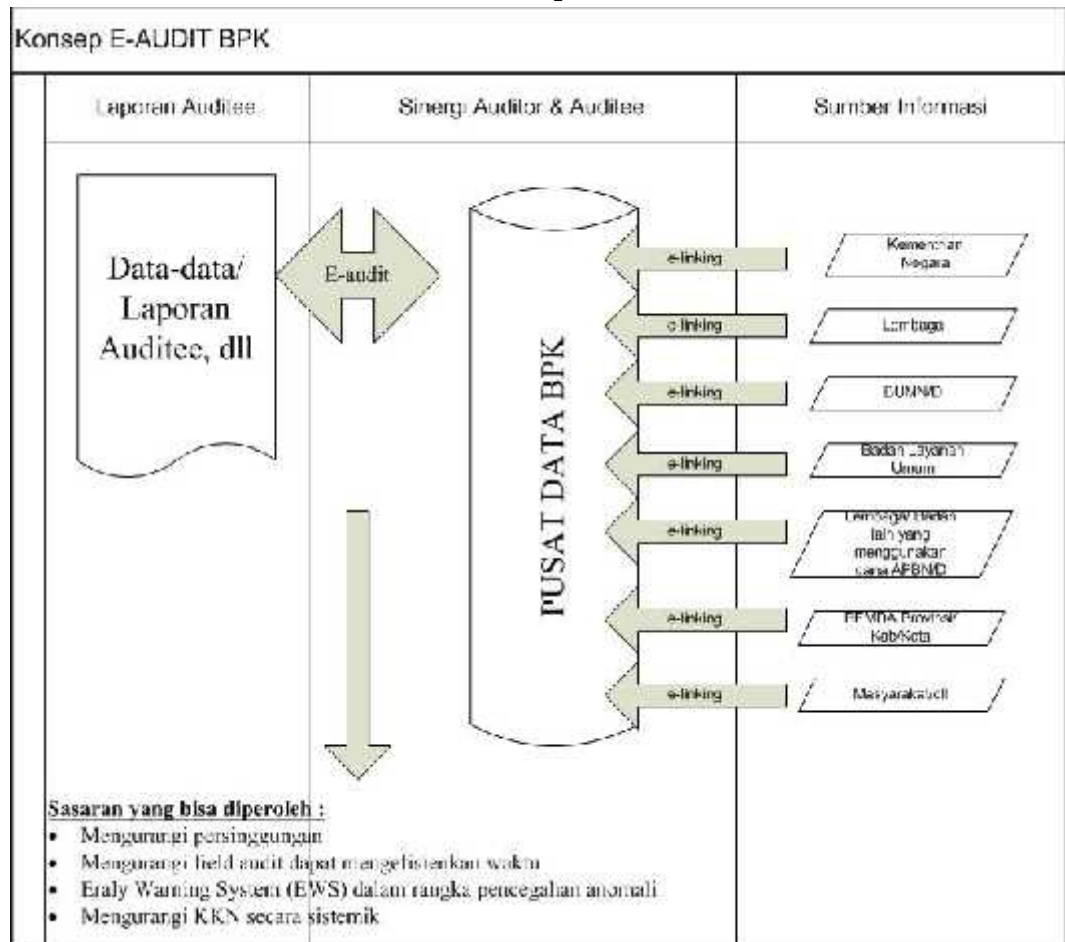
“Electronic auditing, or e-Auditing, is computer-assisted auditing that uses electronic records to complete all or part of the audit. If you use a computer to record your business activity and maintain this data electronically, you are a candidate for an electronic audit”.

E-audit memiliki peran yang difokuskan pada tugas pemeriksaan keuangan terhadap *auditee* atau lembaga-lembaga pengelola keuangan negara berdasarkan suatu mekanisme pemeriksaan elektronik dengan koneksi dari dan ke lembaga *auditee*. Seluruh data yang dibutuhkan akan tersedia lengkap secara elektronik dengan konsep dasar *link and match*.

Menurut Ristriawan, 2011 (Sekjen BPK RI), dalam pemeriksaan *e-audit* yang diterapkan BPK, akan dibangun suatu *template* untuk setiap jenis pemeriksaan. *Template* ini terdiri dari *template* untuk program pemeriksaan, *template* laporan hasil pemeriksaan, *template* profil entitas dan sebagainya. Pada saat pemeriksaan *e-audit*, akan dibangun suatu kertas kerja pemeriksaan secara elektronik (e-KKP). BPK akan membangun suatu *database*

yang menyimpan berbagai data elektronik dari berbagai entitas pemerintah yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan.

Gambar 2.2. Konsep *e-audit*



Sumber : BPK RI, 2013

Protokol atau prosedur dalam perolehan data/informasi elektronik secara online yaitu bagaimana BPK tanpa menghadirkan pemeriksanya ditempat *auditee*, tanpa kemudian terikat oleh waktu, dapat mengambil data yang dibutuhkan.

2.1.5.3. Efektivitas Sistem *e-audit*

Steers (1980:1) mendefinisikan kata efektif dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan jika pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan dapat dikatakan berjalan efektif jika diselesaikan tepat pada waktunya. Handoko (1997:7) juga berpendapat mengenai definisi efektivitas yaitu kemampuan dalam memilih tujuan atau instrumen yang tepat untuk menciptakan suatu pencapaian dari tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan seberapa jauh sasaran (kuantitas, kualitas, waktu dan anggaran) yang telah dipenuhi oleh manajemen, dimana sasaran tersebut telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Cambel (1989,121), terdapat beberapa cara dalam mengukur tingkat efektivitas yang telah umum dan sering digunakan, yaitu :

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Penilaian keefektivan dari penerapan suatu sistem yang baru, harus bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Cascio, (1992) memaparkan bahwa terdapat enam instrumen pengukuran apakah penerapan suatu sistem baru berjalan dengan efektif atau tidak, yaitu :

i. Penilai (*supervisor*)

Mengukur kemampuan dan proses motivasi penilai dalam menilai dan mengukur keberhasilan sistem *e-audit* secara objektif.

ii. Keterkaitan (*relevance*)

Menilai dan mengukur keterkaitan antara variabel pengukuran efektivitas sistem *e-audit* dengan data hasil penilaian.

iii. Kepekaan (*sensitivity*)

Mengukur tingkat keakuratan variabel yang mempengaruhi efektivitas sistem *e-audit*.

iv. Keterandalan (*reliability*)

Mengukur keandalan serta tingkat konsistensi variabel sebagai instrument pengukuran.

v. Kepraktisan (*practicality*)

Mengukur instrumen penilaian sistem *e-audit* yang mudah digunakan dan dimengerti oleh penilai dan pengguna informasi.

vi. Dapat diterima (*acceptability*)

Mengukur kemampuan sistem *e-audit* dalam menilai transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah.

2.1.6. Kompetensi Pemeriksa *E-Audit*

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik (Mc. Ashan, 1981 dalam Majalah JAI Perwakilan BPKP Provinsi NTT, 2012). Lee dan Stone (1995) dalam Irawati (2011), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Seorang pemeriksa BPK harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pemeriksaan keuangan negara, terutama kompetensi dalam penggunaan sistem *e-audit* dengan terampil dan profesional untuk meningkatkan kinerja dari BPK dalam mencapai

tujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Berdasarkan prinsip etika profesi IAI, 2001 pada prinsip kelima dinyatakan bahwa :

“Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik legislasi dan teknik yang paling mutakhir”.

Proses peningkatan kompetensi pemeriksa BPK dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan penerapan pemutakhiran sistem yaitu sistem *e-audit*. Suatu kompetensi atau keahlian dari seorang pemeriksa BPK, dapat dicapai melalui pengetahuan serta pengalaman kerja dibidang audit atau pemeriksaan laporan keuangan. Seorang pemeriksa baik internal BPK, harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk meyakinkan klien dan pihak lainnya bahwa jasa audit yang dilakukannya dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan berkualitas dalam hal mutu dan profesionalisme.

Ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa (Kusharyanti, 2003), yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum baik

secara manual atau berbasis sistem, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu- isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Menurut prinsip etika IAI, 2001, kompetensi professional pelaksanaan *e-audit* dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah:

1. Pencapaian Kompetensi Profesional

Untuk mencapai fase ini, pada awalnya dibutuhkan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

- a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.

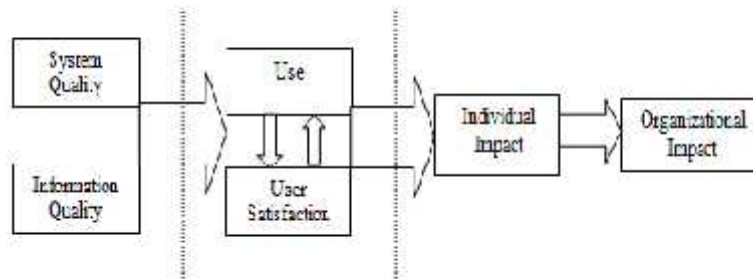
- b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Contoh : ikutserta dalam pelatihan mengenai e-audit.

- c) Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

2.1.7. Kualitas Sistem Informasi

Kualitas sistem dapat didefinisikan sebagai suatu spesifikasi yang diharapkan atas sistem yang diterapkan oleh pengguna. Penerimaan dari suatu sistem merupakan suatu ukuran dari kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut. Tanpa penerimaan, tidak ada kecenderungan untuk menggunakan sistem baru tersebut dalam pelaksanaan proses manajemen (Venkatesh dan Davis, 2000). Dalam melaksanakan kinerja entitas yang berbasis sistem (*e-audit*) dengan baik, kesiapan sistem harus selalu diuji dan diperbaharui untuk menghasilkan output kinerja berupa informasi yang berkualitas dalam mengambil keputusan oleh pengguna informasi. DeLone dan McLean (1992) menyatakan bahwa kualitas sistem didasarkan pada rincian teknis dari antarmuka sistem informasi dan kualitas sistem yang menghasilkan output informasi.

Gambar 2.3
Kualitas Sistem Informasi



Sumber: DeLone dan McLean (1992)

Gambar 2.3 DeLone dan McLean (1992) mengasumsikan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi secara mandiri sama-sama mempengaruhi kepuasan pengguna dan penggunaannya yang dapat berdampak secara individu maupun organisasional. Jadi, Semakin baik kualitas dari sistem informasi, output yang dihasilkan juga akan semakin andal untuk digunakan sebagai pendukung dari kinerja pengguna dan organisasinya.

Berdasarkan konsep dari Wixom dan Todd (2005) mengenai pengukuran kualitas informasi dan kualitas sistem sebagai objek berdasarkan kepercayaan yaitu :

Kualitas sistem menurut Wixom dan Todd :

1) *Reliability* (Keandalan Sistem)

Keandalan sistem dapat dinilai berdasarkan kemampuan sistem untuk terhindar dari kerusakan dan kesalahan (*error*). Semakin

andal suatu sistem yang diterapkan, maka output yang akan dihasilkan pun akan semakin berkualitas.

2) *Flexibility*

Fleksibilitas dalam sistem *e-audit* merupakan kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan terjadi serta berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengguna sistem tersebut.

3) *Integration*

Sistem informasi yang berkualitas adalah sistem yang dapat menghubungkan data-data yang berbeda menjadi berkesinambungan. Sistem yang dapat mengintegrasikan data dengan baik dapat memudahkan pengguna dalam mengolah dan menghasilkan data yang berkualitas untuk digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi.

4) *Accesssibility*

Berkualitas atau tidaknya suatu sistem informasi e-audit dapat dinilai berdasarkan kemudahan pengguna dalam mengakses atau menggunakan sistem tersebut. Kemampuan dalam mengakses dan menggunakan suatu sistem dapat membantu pengguna untuk memudahkan pekerjaannya serta meningkatkan kinerja baik secara individu maupun organisasional.

5) *Timeliness*

Ketepatan waktu atau kecepatan dalam proses pengaksesan suatu sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari pengguna. Kecepatan proses akses sistem dapat meningkatkan kepuasan pengguna sistem itu sendiri.

Kualitas Informasi menurut Wixom dan Todd (2005) :

1) *Completeness*

Wixom dan Todd (2005), *completeness* merupakan kemampuan suatu sistem dalam menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

2) *Accuracy*

Diartikan sebagai suatu pandangan pengguna bahwa informasi yang disajikan dari suatu sistem adalah benar. Informasi yang berkualitas harus terhindar dari kesalahan serta bebas dari ketidakpastian yang dapat menyesatkan pengguna informasi tersebut.

3) *Format*

Suatu pemahaman dari pengguna mengenai bagaimana penyajian informasi yang baik dan benar. Tampilan informasi yang disajikan harus bersifat baku, yang dapat dinilai baik oleh pengguna informasi.

4) *Currency* (Pembaharuan)

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang menunjukkan kondisi sebenarnya terjadi saat ini. Informasi digunakan untuk mengambil keputusan, sehingga untuk menghasilkan informasi yang baik, harus ada pembaharuan terhadap informasi tersebut.

2.1.8. Temuan Audit

2.1.8.1. Definisi Temuan Audit

Rai (2008), temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Temuan audit merupakan suatu hasil penilaian atas bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit (ISO 9000:2005).

Temuan audit dapat menggambarkan sebuah kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit. Ketidakesuaian merupakan penyimpangan yang ditemukan berdasarkan bukti obyektif atas kriteria audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemeriksa bertugas untuk memeriksa dan menetapkan kriteria

pelanggaran serta rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Terdapat 3 jenis ketidaksesuaian dalam temuan audit, yaitu :

1) Major

Suatu temuan audit yang tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya dilakukan. Temuan audit ini harus segera dilakukan perbaikan.

2) Minor

Suatu temuan audit yang berasal dari inkonsistensi dalam pelaksanaan prosedur akuntansi. Pada temuan audit minor, ditetapkan batas waktu untuk dilakukan perbaikan.

3) Observasi

Suatu temuan audit yang tidak termasuk persyaratan prosedur akuntansi namun sebaiknya dilaksanakan. Dalam temuan ini, pemeriksa akan memberikan rekomendasi sebagai usulan peningkatan.

2.1.8.2. Ciri-ciri Temuan Audit yang Baik

Menurut Rai, 2008, terdapat tiga ciri temuan audit yang dikategorikan baik, yaitu :

1. Temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai

Bukti yang mencukupi diperlukan agar pihak yang diaudit dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit.

2. Temuan audit harus penting (Material)

Penting dan tidaknya suatu temuan diindikasikan apabila pengguna laporan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan atau temuan tersebut.

3. Temuan audit harus mengandung unsur temuan

Temuan audit harus menguraikan secara jelas mengenai kondisi, kriteria, dan sebab-akibat. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kesulitan dalam pembuatan laporan audit yang cepat dan mudah dipahami sering kali berkaitan dengan pengembangan dan pengorganisasian atribut tersebut dalam laporan.

a) Kondisi

Suatu gambaran situasi yang sepenuhnya terjadi di lembaga atau organisasi yang diaudit.

b) Kriteria

Sesuatu yang seharusnya terjadi di organisasi yang diaudit, yang berupa standar masukan (*input*) serta standar proses kerja, dan standar hasil (*output*), baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria adalah standar yang digunakan

untuk menentukan apakah suatu program dapat mencapai atau melebihi harapan serta untuk memahami hasil audit.

c) Sebab-Akibat

Diketuainya penyebab dari suatu masalah secara jelas, dapat memudahkan pemeriksa dalam membuat rekomendasi yang tepat untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas yang diaudit. Akibat suatu temuan harus dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan perbaikan harus dilakukan.

2.1.9. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Easy Of Use*)

Diartikan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan sistem tertentu adalah mudah (davis, 1989). Penggunaan sistem (*actual system usage*) sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk menggunakan (*behavioral intentions toward usage*). *Behavioral intentions toward usage* tersebut dipengaruhi atas dua indikator utama, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi pengguna terhadap kemudahan (*perceived easy of use*). Penanaman persepsi kemudahan akan suatu sistem untuk digunakan, dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pengguna sistem (pemeriksa BPK) terhadap sistem *e-audit*.

2.1.10. Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*)

Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya baik secara positif maupun negatif bahwa menggunakan teknologi melalui sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Bertolak dari konsep model TAM, persepsi manfaat merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap penerimaan dari pengguna terhadap penerapan suatu sistem informasi (Davis, 1989). Keyakinan pengguna (pemeriksa BPK) bahwa penerapan sistem *e-audit* dapat membantu meningkatkan kinerjanya dapat mempengaruhi penerimaan pemeriksa atas sistem *e-audit* tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada tiga jurnal acuan. Pertama, jurnal Wixom dan Todd (2005) yang berjudul “*A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance*”. Kedua, Permana (2013) dengan judul “Persepsi terhadap E-Government Pada Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan”. Ketiga, Nurochman dkk (2012) dengan judul penelitian “Mewujudkan *Sustainability* Sistem Informasi *E-Audit*”, yang menghasilkan kesimpulan lima variabel (*leadership, culture and climate, capabilities, motivation, serta innovation and learning*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan sistem informasi *e-audit*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

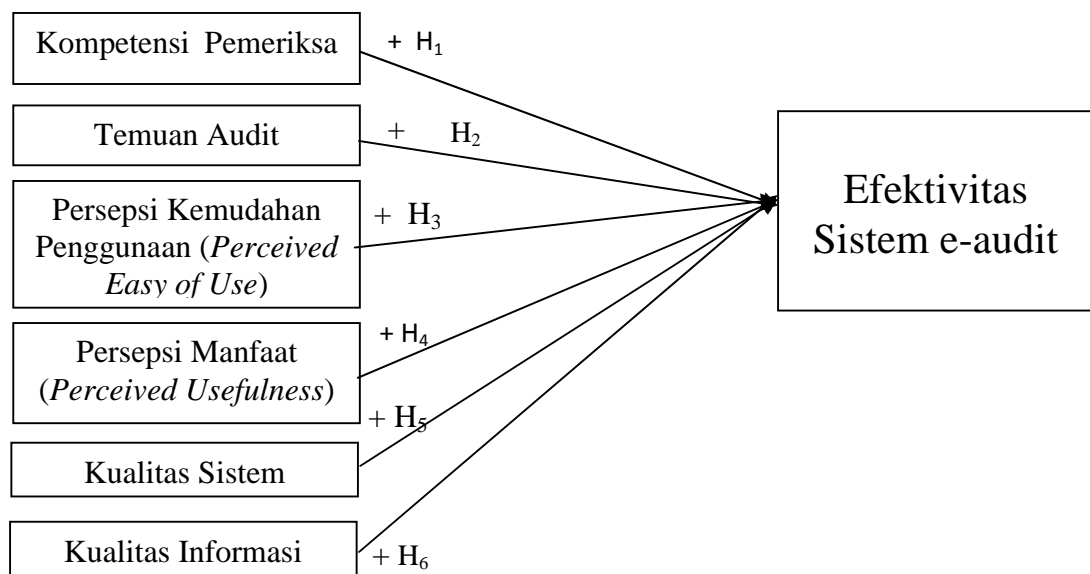
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wixom dan Todd (2005)	<i>A Theoretical Integration of User Satisfaction and Technology Acceptance</i>	Partial Least Squares (PLS)	Model integrasi antara user satisfaction dan Technology Acceptance dapat terpenuhi
2.	Putu Jaya Permana (2013)	Persepsi terhadap E-Government Pada Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Regresi linier berganda	Persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pengguna terhadap <i>e-government</i>
3.	Nurrochman, dkk (2012)	Mewujudkan <i>Sustainability</i> Sistem Informasi <i>E-Audit</i>	<i>Structural Equation Modelling</i> (SEM) Smart PLS Versi 2.0	Kelima variabel (<i>leadership, culture and climate, capabilities, motivation, serta innovation and learning</i>) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan sistem informasi <i>e-audit</i> .

Sumber : Wixom dan Todd (2005), Permana (2013), Nurochman dkk (2012).

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini menggambarkan tentang analisis kompetensi pemeriksa, temuan audit, persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap efektivitas sistem *e-audit*. Gambar 2.4 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

Di bagian ini dijelaskan berbagai rumusan hipotesis dengan argumentasinya.

Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Kompetensi Pemeriksa

Suatu kompetensi atau keahlian dari seorang pemeriksa, dapat dicapai melalui pengetahuan serta pengalaman kerja dibidang audit. Seorang pemeriksa baik internal maupun eksternal suatu entitas, harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk meyakinkan klien dan pihak lainnya bahwa jasa audit yang dilakukannya dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan, dan berkualitas dalam hal mutu dan profesionalisme.

Ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa (Kusharyanti, 2003) dalam meningkatkan kompetensinya, yaitu : (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu- isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Kompetensi pemeriksa yang semakin baik, akan menjadikan hasil pemeriksaan *e-audit* semakin efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₁ : Terdapat hubungan positif antara variabel kompetensi pemeriksa dengan efektivitas sistem *e-audit*.

2.4.2. Temuan Audit

Rai (2008), Temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Semakin banyak jumlah temuan serta semakin material tingkat temuan dalam audit, maka penerapan sistem *e-audit* semakin efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₂ : Terdapat hubungan positif antara variabel temuan audit dengan efektivitas sistem *e-audit*.

2.4.3. Persepsi Kemudahan Pengguna (*Perceived Easy of Use*)

Davis *et al.* (1989) mendefinisikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam memanfaatkan sistem tertentu tidak memerlukan usaha yang keras atau dapat dikatakan mudah dalam mengoperasikan sistem tersebut. Persepsi ini merupakan salah satu faktor dari model TAM yang telah dilakukan pengujian oleh Davis *et al.* (1989). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dijelaskan bahwa teknologi yang

berkembang dapat menciptakan suatu sistem baru yang diterima oleh pengguna. Dengan demikian hipotesis yang dapat dibangun adalah :

H₃ : Terdapat hubungan positif antara variabel persepsi kemudahan dengan efektivitas sistem *e-audit*.

2.4.4. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Perceived usefulness diartikan sebagai sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan teknologi sistem informasi yang baru dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Berdasarkan penjelasan tersebut, persepsi manfaat merupakan suatu kepercayaan mengenai proses pengambilan keputusan. Ketika seseorang mempercayai bahwa sistem informasi yang diterapkan kurang bermanfaat maka ia tidak akan mengoperasikannya. Konsep yang berasal dari model TAM ini juga menunjukkan manfaat sistem bagi pemakainya yang erat kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, kinerja pekerjaan dan manfaat secara keseluruhan (Davis, 1989). Dengan demikian hipotesis yang akan dibangun adalah :

H₄ : Terdapat hubungan positif antara variabel persepsi manfaat dengan efektivitas sistem *e-audit*.

2.4.5. Kualitas Sistem

DeLone dan McLean (1992) menyatakan bahwa sistem yang berkualitas didasarkan pada penjelasan teknis dari antarmuka sistem informasi dan kualitas sistem yang memberikan keluaran berupa informasi. Wixom dan Todd (2005) mengatakan bahwa kualitas sistem dinilai berdasarkan keandalan, ketepatan waktu, kemudahan akses, fleksibilitas, pembaharuan dapat mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sistem yang diterapkan. Davis, 1989 menyarankan untuk menggunakan karakteristik sistem dalam menilai efektivitas pelaksanaan sistem. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₅ : Terdapat hubungan positif antara variabel kualitas sistem dengan efektivitas sistem *e-audit*.

2.4.6. Kualitas Informasi

Kualitas informasi merupakan suatu penilaian terhadap informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem. DeLone dan McLean (2004) menyatakan bahwa informasi yang berkualitas adalah informasi yang sistem berikan kepada para penggunanya. Untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas harus menggunakan beberapa indikator penilaian (Wixom dan Todd, 2005), seperti kelengkapan,

akurasi, format dan pembaharuan data, dengan demikian dapat dihasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dibangun adalah :

H₆ : Terdapat hubungan positif antara variabel kualitas informasi dengan efektivitas sistem *e-audit*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat membedakan dan merubah nilai. Variabel Dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2010). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen, keempat variabel penelitian sebagai berikut:

Variabel dependen : Efektivitas Sistem *E-audit* (Y)

Variabel independen : Kompetensi Pemeriksa (X1)

Temuan Audit (X2)

Kualitas Sistem (X3)

Kualitas Informasi (X4)

Persepsi Kemudahan Penggunaan (X5)

Persepsi Kegunaan atau Manfaat (X6)

Seluruh variabel yang menjadi objek penelitian ini merupakan variabel *latent* atau konstruk yaitu variabel yang tidak dapat diukur

secara langsung (*unobserved*). Dengan demikian, variabel-variabel ini diukur oleh indikator-indikator dalam bentuk pertanyaan dengan skala likert (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap pertanyaan yang akan diajukan dengan menggunakan skala likert lima tingkat. Skala likert lima tingkat merupakan skala tingkat persetujuan terhadap pertanyaan yang menjadi indikator dengan rentang skala 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: Ragu-ragu, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju.

3.1.2. Definisi Operasional

Definisi operasional serta pengukuran masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem *E-Audit*

Efektivitas *e-audit* merupakan suatu kondisi dimana penerapan kebijakan audit berbasis sistem bersifat tepat guna dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dikalangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Efektivitas *e-audit* adalah variabel dependen yang akan diuji karena merupakan variabel *unobserved*. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel independen yang

berpengaruh pada efektivitas sistem *e-audit* dalam penelitian ini diadopsi dari pertanyaan hasil modifikasi dari berbagai sumber.

2. Kompetensi Pemeriksa

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan atau kemampuan yang dikuasai seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik (Mc. Ashan, 1981 dalam Majalah JAI Perwakilan BPKP Provinsi NTT, 2012). Lee dan Stone (1995) dalam Irawati (2011), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

3. Banyak Temuan Audit

Rai (2008), temuan audit adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Temuan audit merupakan suatu hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan (ISO 9000:2005).

4. Persepsi Kemudahan Sistem

Davis *et al.* (1989) mendefinisikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sebagai suatu tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam memanfaatkan sistem tertentu tidak memerlukan usaha yang keras atau dapat dikatakan mudah dalam mengoperasikan sistem tersebut. Persepsi ini merupakan salah satu faktor dari model TAM yang telah dilakukan pengujian oleh Davis *et al.* (1989).

5. Persepsi Kegunaan

Perceived usefulness diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya baik secara positif maupun negatif bahwa menggunakan teknologi melalui sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Bertolak dari konsep model TAM, persepsi manfaat merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap penerimaan dari pengguna terhadap penerapan suatu sistem informasi (Davis, 1989).

6. Kualitas Sistem

DeLone dan McLean (1992) menyatakan bahwa sistem yang berkualitas didasarkan pada penjelasan teknis dari antarmuka sistem informasi dan kualitas sistem yang memberikan keluaran berupa informasi. Wixom dan Todd (2005) mengatakan bahwa

kualitas sistem dinilai berdasarkan keandalan, ketepatan waktu, kemudahan akses, fleksibilitas, pembaharuan dapat mempengaruhi pengguna untuk menggunakan sistem yang diterapkan. Davis, 1989 menyarankan untuk menggunakan karakteristik sistem dalam menilai efektivitas pelaksanaan sistem.

7. Kualitas Informasi

Kualitas informasi merupakan suatu penilaian terhadap informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem. DeLone dan McLean (2004) menyatakan bahwa informasi yang berkualitas adalah informasi yang sistem berikan kepada para penggunanya. Untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas harus menggunakan beberapa indikator penilaian (Wixom dan Todd, 2005), seperti kelengkapan, akurasi, format dan pembaharuan data, dengan demikian dapat dihasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Pengukuran	Skala
1.	Kompetensi Pemeriksa (X1)	<i>Adaptive Structuration Theory</i> (Dowling dan Leech, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi, integritas, dan profesionalisme 2. Pendidikan yang berkelanjutan 3. Pelatihan dibidang <i>e-audit</i> 4. Kemampuan dan pengetahuan pemeriksa 	ORDINAL Skala Likert 5 poin
2.	Temuan Audit (X2)	<i>Adaptive Structuration Theory</i> (Dowling, dan Leech, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materialitas temuan 2. Bukti temuan 3. Sesuai SPKN 	ORDINAL Skala Likert 5 poin
3.	<i>Perceived Ease of Use</i> (X3)	<i>Technology Acceptance Model</i> (Wixom dan Todd, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah digunakan 2. Mudah dalam pemasukan data 3. Memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi 	ORDINAL Skala Likert 5 poin
4.	<i>Perceived Usefulness</i> (X4)	<i>Technology Acceptance Model</i> (Wixom dan Todd, 2005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja dalam audit laporan keuangan pemerintahan 2. Meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja 4. Membantu mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 	ORDINAL Skala Likert 5 poin
5.	Kualitas Sistem (X5)	<i>Adaptive Structuration</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat selalu diakses oleh pemeriksa 	ORDINAL Skala Likert 5

		<i>Theory</i> (Dowling, dan Leech, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fitur yang memahami pengguna 3. Tidak mudah mengalami <i>error</i> 4. Membantu efektivitas dan efisiensi atas waktu dan biaya 	poin
6.	Kualitas Informasi (X6)	Teori AST (Dowling dan Leech, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan hasil audit yang akurat 2. Informasi relevan 3. Informasi jelas, mudah dipahami, serta <i>up to date</i> 	ORDINAL Skala Likert 5 poin
7.	Efektivitas sistem <i>e-audit</i> (Y)	<i>Technology Acceptance Model</i> dan <i>Adaptive Structuration Theory</i> (Wixom dan Todd, 2005, Dowling dan Leech, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan laporan keuangan yang andal 2. Efektif dan efisien dalam pengumpulan data hingga proses audit 3. Meningkatkan kepekaan terhadap akuntabilitas laporan keuangan 4. Sebagai upaya dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan 	ORDINAL Skala Likert 5 poin

Sumber : Wixom dan Todd (2005) dan Dowling dan Leech (2005)

3.2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi staf pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan *e-audit*. Penelitian ini menggunakan

metode studi kasus yaitu dengan menggunakan populasi keseluruhan dari pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan dengan sarana *e-audit*.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Pengertian sumber data adalah informasi yang memiliki arti bagi penggunaannya. Data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diambil serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data identitas responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan

kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

2. Tinjauan Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data langsung di lapangan melalui kuesioner atau angket. dengan lembar kuesioner untuk pengambilan data primer dan studi dokumentasi.

Data–data yang dikumpulkan adalah lembar kuesioner yang diberikan pada Pemeriksa BPK. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada data yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dibawah ini :

1. Pemeriksa internal BPK yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan mengenai penerapan sistem baru yaitu sistem *e-audit*.
2. Pemeriksa BPK yang telah bekerja minimal selama 5 tahun.
3. Pemeriksa BPK yang telah menempuh pendidikan minimal Sarjana.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat berdasarkan jumlah data, nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi. Berdasarkan data tersebut, dilakukan analisis terhadap beberapa variabel

penelitian, diantaranya kompetensi pemeriksa, temuan audit, perspsi kemudahan, persepsi manfaat, kualitas sistem, serta kualitas informasi.

3.6. Uji Normalitas Data

3.6.1. Uji *Shapiro Wilk*

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (untuk sampel besar > 50) dan uji *Shapiro Wilk* (untuk sampel kecil < 50). Peneliti menggunakan uji *Shapiro Wilk* dalam menentukan normalitas penyebaran data, hal ini dikarenakan jumlah responden yang diteliti sebanyak 17 orang ($n=17$) yang termasuk dalam kelompok sampel kecil. Data dikatakan terdistribusi normal jika memenuhi syarat yaitu besar nilai *test of normality* $> 0,05$.

3.7. Uji Reliabilitas dan Validitas

3.7.1. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

3.7.2. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah dengan menggunakan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total konstruk (Ghozali, 2011).

3.8. Pengujian Hipotesis

3.8.1. Uji Koefisien Korelasi *Pearson Product Moment*

Korelasi adalah suatu ukuran yang menyatakan derajat hubungan linier antar dua variabel atau lebih. Korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y (Mason dan Lind, 1996). Korelasi pearson juga dapat digunakan untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Besarnya nilai dalam korelasi *Pearson* adalah dengan r terbesar bernilai +1 yang menunjukkan hubungan positif sempurna sedangkan r terkecil bernilai -1 yang menunjukkan hubungan negatif sempurna. Taraf signifikansi ()

memiliki nilai 0,05 dan 0,01. Uji person akan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} \sqrt{n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

Dengan :

r = Besarnya nilai korelasi antar variabel

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

n = Jumlah responden

Interpretasi nilai r adalah sebagai berikut :

R	Interpretasi
0	Tidak Berkorelasi
0,01-0,20	Korelasi Sangat Rendah
0,21-0,40	Rendah
0,41-0,60	Agak Rendah
0,61-0,80	Cukup
0,81-0,99	Tinggi
1	Sangat Tinggi